

# KINERJA DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

Oleh

Zheren Anggita Sumakul<sup>1</sup>,  
Ermaya Suradinata<sup>2</sup>, Bambang Supriyadi<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri

anggitasumakul@gmail.com

<sup>2,3)</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri

---

## ABSTRACT

*This research aims to know how the performance of Tourism Department in tourism development at North Minahasa, the obstacles that they faced in developing the tourism of North Minahasa, and the efforts that the government has been doing, both in the short terms or even the long terms.*

*This research method is using Descriptive Qualitative with Inductive approach, for the purpose of illustrating the phenomenon that is related with this research scope. The used data sources are person, place, and paper. The technique that's been used to collect both data and information is documentation, observation, interview and triangulation.*

*According to the result of the research and processed data, was obtained: 1) Productivity (input and output), Service quality (information giving and quality of human resources), Responsivity (comprehend ability and people's will), Responsibility (obligation and cooperation), Accountability (compatibility and act) is running well but isn't maximized yet 2) the interrupting factors to the Performance of Tourism Department of North Minahasa are lack of human resources that has tourism education, lack of budget, cooperation with other party, infrastructure, and promotion of tourism objectives 3) All the efforts that has been done in the short terms are cooperating with other parties, proposing adequate budget, seek for human resources that has tourism education and completing tourism's infrastructure. At the same time, the long terms effort is to make the evaluation substances towards the next RIPPDA.*

**Keywords:** *development, tourism, performance*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara, apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam pengembangan Pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara, serta upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan yang dihadapi baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan induktif yang bertujuan menggambarkan fenomena yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah person (orang), place (tempat), paper (data). Untuk pengambilan data dan informasi dilakukan menggunakan teknik dokumentasi, observasi, wawancara dan triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data diperoleh 1) Produktivitas (*input* dan *output*), Kualitas layanan (pemberian informasi dan kualitas Sumber Daya Manusia), Responsivitas (daya tangkap dan keinginan masyarakat), Responsibilitas (tanggung jawab dan kerja sama), Akuntabilitas (tingkat kesesuaian dan tindakan) sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum maksimal 2) faktor penghambat Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara, yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia berlatar belakang pendidikan Pariwisata, kurangnya anggaran, kerja sama dengan pihak lain, sarana prasarana, promosi objek wisata 3) Upaya yang dilakukan secara jangka pendek, yaitu bekerja sama dengan pihak lain, mengusulkan anggaran yang memadai, mencari sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan pariwisata dan melengkapi sarana dan prasarana objek wisata. Sedangkan upaya jangka panjang menjadikan bahan evaluasi terhadap RIPPDA selanjutnya.

**Kata kunci:** pengembangan, pariwisata, kinerja

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki suatu wilayah yang sangat luas dengan keanekaragaman yang tercermin dalam satu ikatan Kesatuan yang terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di berbagai daerah serta keanekaragamannya tersebut, maka pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan Nasional lebih diarahkan dalam pengembangan daerah bertujuan untuk menyerasikan laju pertumbuhan pembangunan antardaerah di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan didukung oleh sumber daya alam yang beraneka ragam dalam hal ini, yaitu pariwisata, baik wisata alam, sejarah maupun budaya yang tersebar di setiap wilayahnya, yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik.

Pariwisata di Indonesia tersebar di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke, sehingga untuk memudahkan pengembangannya maka masing-masing daerah mempunyai wewenang sendiri dalam mengembangkan pariwisata yang ada. Hal ini juga berdasarkan pada pelaksanaan UU No 23 Tahun 2014 mengenai pemberlakuan

Otonomi Daerah, dengan ini Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola segala potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Hal tersebut juga berlaku untuk pariwisata, karena pariwisata merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh suatu daerah.

Awal tahun 2019 Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mematangkan rencana pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Tanjung Pulisan, Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. Kepala Dinas Pariwisata Sulut Daniel A. Mewengkang “mengatakan bahwa rencana kawasan yang akan berdiri di atas lahan seluas 396 hektare itu tengah dibahas secara intensif oleh Pemerintah Provinsi Sulut dan Kementerian Pariwisata.”<sup>1</sup> Sebagai tahap awal, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Sulut dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah menyiapkan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan dari Bandara Sam Ratulangi menuju Tanjung Pulisan sepanjang 39 kilometer.

Proses pembebasan lahan dimulai tahun ini dan diperkirakan akan selesai pada akhir tahun. Dengan proyeksi tersebut, pembangunan jalan diharapkan dapat dimulai pada akhir tahun ini. Sebelumnya,

1 Kabar Sulawesi Utara, 20 November 2019

dalam rapat Rapat Koordinasi Percepatan Pengusulan KEK Pariwisata, Asisten Deputi Bidang Investasi Pariwisata Kemenpar, Henky Manurung menilai pemerintah daerah sudah cukup koordinatif dan siap mengembangkan KEK tersebut. Namun, proses pengusulan perlu melalui tahapan birokrasi yang ada dengan terlebih dahulu

mengajukan usulan kepada pemerintah dan dikaji lebih lanjut oleh Dewan KEK. Dia optimistis, KEK Tanjung Pulisan akan segera ditetapkan dan dapat menjadi KEK Pariwisata pertama di Sulawesi.

Lokasi objek wisata di Kabupaten Minahasa Utara dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1** Lokasi Objek Wisata Di Kabupaten Minahasa Utara, 2018

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Objek
1.	Kema	Kema Satu	Pantai Asparaga
		Kema Dua	Penjara Tua
		Tontalete	Kompleks Waruga Kema II
2.	Kauditan	Lembean	Kompleks Waruga Tontalete
			Danau Seper
			Bukit Waleposan
		Treman	Kompleks Waruga Lembean
		Kaima	Kompleks Waruga Treman
3.	Airmadidi	Tumaluntung	Kompleks Waruga Kaima
		Sawangan	Kompleks Waruga Tumaluntung
			Kolam Renang River Park
			Arung Jeram
			Kompleks Waruga Sawangan
		Airmadidi Bawah	Kolam dan Pancuran Tumatenden
		Raprap	Kompleks Waruga Airmadidi Bawah
Airmadidi Atas	Kompleks Waruga Raprap		
4.	Kalawat		Gunung Klabat
			Kompleks Wisata Kaki Dian
			Hutan Kenangan
5.	Dimembe	Kaleosan	Raewayaya Hills
		Maumbi	Air Panas Kaleosan
			Makam M.W. Maramis
6.	Talawaan		Kompleks Waruga Maumbi
		Matungkas/Laikit	Gereja Tua Malak
7.	Wori	Talawaan	Air Terjun Tunan
		Tetey	Gunung Kekewang
7.	Wori	Kima Bajo	Cocotinus Resort
		Kulu	Pantai Pulau Paniki
		Nain	Pantai Pasir Bungin
		Budo	Ekowisata Desa Budo
		Wori	Ekowisata Desa Wori

8.	Likupang Barat	Gangga I	Gangga Island Resort Pulau Lihaga
		Tarabitan	La Merry Resort Kinaari Resort
		Bahoi	Ekowisata Desa Bahoi
9.	Likupang Timur	Wineru	Pantai Surabaya
		Kalinaun	Pantai Kalinaun Pantai Sampiran Pulo Komang
		Marinsow	Pantai Paal
		Kokoleh 1	Waruga kokoleh
10	Likupang Selatan		

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

**Tabel 2** Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Minahasa Utara 2011-2018

No.	Tahun	Wisatawan (Orang)		Jumlah (orang)
		M mancanegara	Domestik	
1.	2011	8.901	11.876	20.777
2.	2012	8.987	11.694	20.681
3.	2013	9.026	11.873	20.899
4.	2014	9.055	11.901	20.956
5.	2015	9.126	14.263	23.389
6.	2016	14.735	14.972	29.707
7.	2017	17.091	29.678	46.769

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

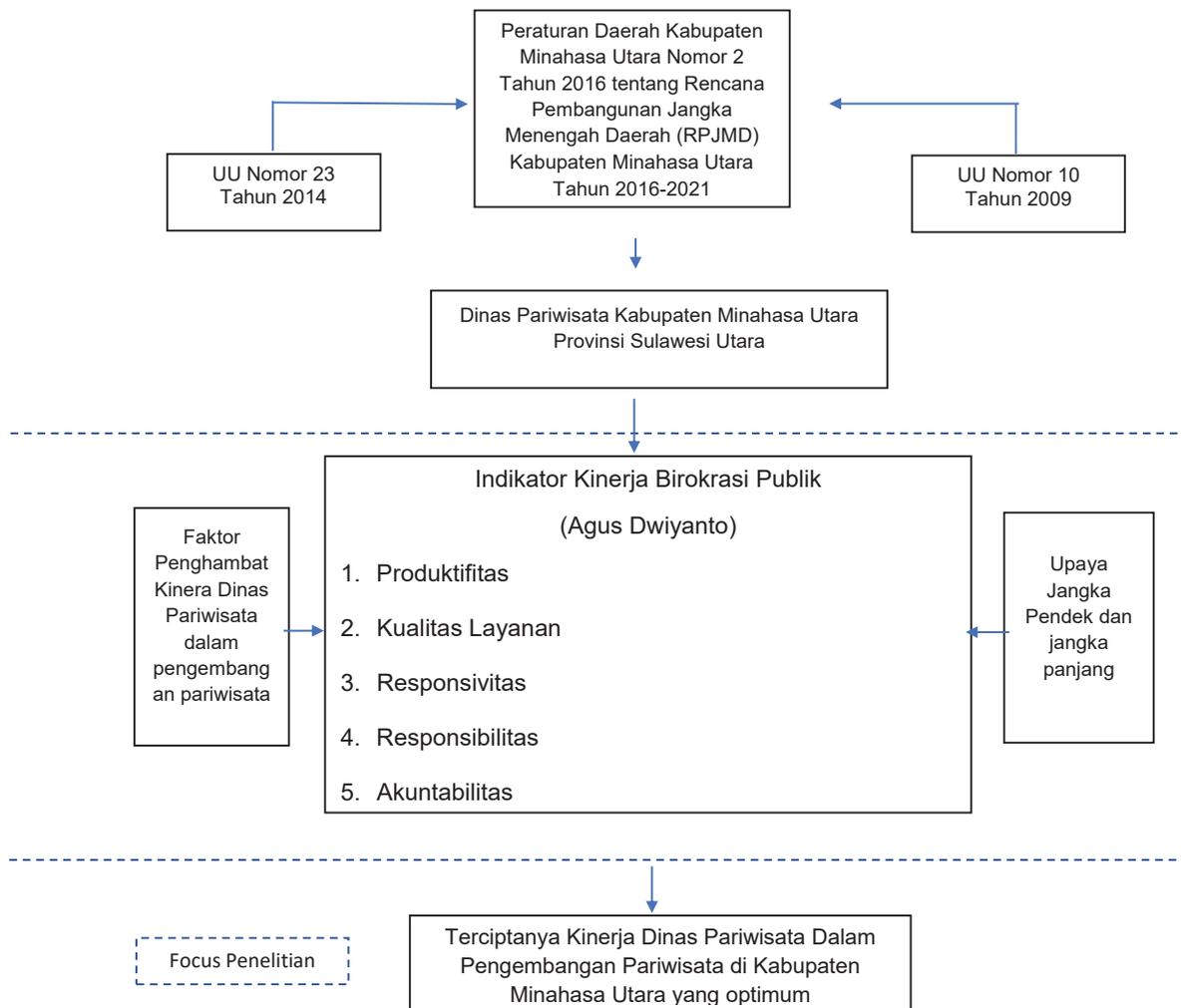
Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara tahun 2018 mengungkapkan bahwa jumlah wisatawan baik domestik dan mancanegara yang berkunjung ke kabupaten Minahasa Utara selalu meningkat setiap tahun sebagaimana tampak pada tabel 2. Berdasarkan data tabel 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dituntut untuk dapat menggali dan mengelola potensi pariwisata yang dimiliki melalui terobosan-terobosan baru dalam peningkatan kualitas objek wisata dan pemberdayaan masyarakat di sekitar objek wisata. Hal ini akan mendorong meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara sehingga akan meningkatkan penerimaan daerah terutama retribusi objek wisata dan juga akan memengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat sekitarnya.

### Masalah Penelitian

Memperhatikan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan tentang Kepariwisataan pada Dinas Kabupaten Minahasa Utara
2. Keterbatasan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah dalam pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara;
3. Kurangnya kerja sama dengan pihak dan instansi lain yang terkait dalam mengembangkan kawasan pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara;

4. Kurangnya sarana dan prasarana di objek wisata
  5. Kurangnya promosi wisata dalam kepada masyarakat luas
- Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.
1. Bagaimanakah Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan pariwisata di kabupaten Minahasa Utara?
  2. Apa saja faktor penghambat Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara?
  3. Upaya apa yang akan di ambil oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara dalam menyelesaikan faktor penghambat Kinerja Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara?



**Gambar 1**  
Kerangka Pemikiran

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kinerja

Agus Dwiyanto mengemukakan beberapa indikator yang dijadikan ukuran dalam mengukur sebuah kinerja birokrasi publik, antara lain sebagai berikut.

#### 1. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output*. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

#### 2. Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

#### 3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung

menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya akan memiliki kinerja yang rendah.

#### 4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

#### 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil [penelitian, diketahui bahwa Kinerja Dinas Pariwisata dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Minahasa Utara sudah dikategorikan baik, melihat teori Kinerja yang disampaikan Agus Dwiyanto, yaitu produktivitas, Kualitas Layanan. Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Kinerja dari Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa utara dalam pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, telah dilaksanakan secara maksimal untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Minahasa utara kepada wilayah luar. Dalam tahap pengembangan, Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara mencoba memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada agar ke depan Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara bisa lebih baik untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada di setiap objek wisata

Faktor-faktor penghambat Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara dalam pengembangan pariwisata di kabupaten minahasa utara dapat dilihat dari, kurangnya investor yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara, Masih kurangnya sumber daya aparatur yang belatar belakang pendidikan tentang pariwisata, masih terbatasnya anggaran yang diberikan untuk pengembangan pariwisata, kurangnya kerja sama yang dilaksanakan dengan instansi lainnya yang terkait dalam Kepariwisata, kurangnya sarana dan prasarana seperti tempat penginapan di sekitar objek-objek wisata, kurangnya promosi objek wisata di media sosial.

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan hasil wawancara dapat ditemukan upaya yang akan dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara untuk mengatasi faktor penghambat secara jangka pendek dan jangka panjang. Upaya-upaya tersebut antara lain: Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara dapat mencari sumber daya

aparatur yang belatar belakang pendidikan pariwisata agar dapat meningkatkan keberhasilan Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara

## SIMPULAN

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara dapat mengusulkan tambahan anggaran yang memadai untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara
2. Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara berupaya bekerja sama dengan instansi lainnya yang mau membantu dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Minahasa Utara
3. Dinas Pariwisata akan memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di setiap objek wisata agar wisatawan nyaman berada di objek wisata.
4. Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara akan mempromosikan objek wisata yang berada Minahasa Utara melalui blog Dinas Pariwisata dan akan membentuk pusat informasi wisata sementara pada tiap even Nasional dan Internasional. Upaya jangka panjang yang diambil oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara akan menjadikan dasar terhadap perbaikan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara tahun 2015-2025.

## SARAN

Hasil pembahasan dan analisis serta simpulan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut

- a. Dalam tahapan kinerja dalam mempertimbangkan keunggulan dalam pengembangan objek wisata harus lebih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga apa yang menjadi tujuan dalam kinerja tersebut

dapat berjalan dengan baik dan Dinas Pariwisata agar dapat mencari investor-investor yang tepat untuk mempercepat pengembangan.

- b. Guna mengatasi dan mengurangi hal-hal yang menjadi penghambat kinerja Dinas Pariwisata dalam pengembangan objek wisata maka Pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara dapat melakukan dengan cara sebagai berikut.
- c. Mengusulkan anggaran yang memadai kepada pemerintah kabupaten Minahasa Utara untuk mengembangkan setiap objek wisata di Kabupaten Minahasa utara menurut kebutuhan masing-masing objek wisata
- d. Menyeleksi sumber daya aparatur yang mempunyai latar belakang pendidikan pariwisata
- e. Melengkapi sarana prasarana di setiap kawasan wisata agar membuat para wisatawan merasa nyaman.
- f. Mempromosikan pariwisata yang ada di Minahasa Utara ke Media Cetak Nasional seperti Kompas, Majalah Tempo, dll dan sebaiknya membuat iklan di Baliho Pintu Keluar Bandara Internasional Soekarno Hatta sebagai Pintu Utama masuk Indonesia. dan merencanakan untuk membangun kantor tetap untuk pusat informasi wisata Kabupaten Minahasa Utara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ashar Sunyoto Munandar (2008). *Psikologi Industri dan Organisasi*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bryson, Jhon M, 2008, *Perencanaan Strategi Bagi Organisasi Sosial*, Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Indonesia: Prenada Media Group.
- Freedman, Mike, 2004, *The Art and Dicipline Of Strategic Leadership*, Gramedia Pustaka: Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*: Jakarta. Bumi Aksara
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta
- Leo Agustino, , 2014 *Dasar-dasar kebijakan publik* Bandung,
- Mahmudi, (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Moekijat, 2005. *Pengembangan Organisasi*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nasution, Faisal Akbar. 2009. *Pemerintahan Daerah dan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: PT Sofmedia.
- Nasution, 2011. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Mohammad. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pitana, I Gede dan I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: CV. Andi Offset (Penerbit Andi).
- Robbins, Stephen, 2006, *“Perilaku Organisasi”*, Prentice Hall, edisi kesepuluh Sabardini, 2006, *“Peningkatan Kinerja Melalui Perilaku Kerja Berdasarkan Kecerdasan Emosional”*
- Dwiyanto, Agus. 2006. *“Transparansi Pelayanan Publik”*, dalam Agus Dwiyanto,ed .2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi*. Bandung: Fokus Media.
- Soemitro, Rachmat. 1988. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: PT. Eresco.

- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta
- Thoha, Miftah. 2008. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Yoeti, Oka A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- , 2010. *Dasar-dasar Pengertian Hospitaliti dan Pariwisata*. Bandung: PT Alumni.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2005-2025

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016-2021.
- Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 93 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Tipe A Kabupaten Minahasa Utara.